

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dibentuknya otonomi daerah bertujuan agar dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan terciptanya kemandirian suatu daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah .

Berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah daerah sebagai perencana keuangan dapat memberikan kebijakan untuk melakukan penentuan komposisi belanja daerah khususnya belanja modal yang akan berdampak pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi peningkatan layanan publik yang meliputi pembangunan infrastruktur yang kemudian akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya pemerintah lebih mengalokasikan belanja daerah ke dalam belanja operasi yang kurang berdampak terhadap kualitas peningkatan layanan publik dan lebih mementingkan untuk kepentingan sepihak . Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum bijak dalam

penentuan alokasi belanja daerah yang khususnya lebih banyak untuk belanja modal.

Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa sumber pembiayaan keuangan daerah berasal dari PAD dan dana perimbangan yang meliputi DAU, DBH dan DAK. Kebijakan yang diberikan Pemerintah pusat bertujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan fiskal dan perbedaan kemampuan untuk setiap daerah. Dari dana perimbangan yang ada, hanya DAU yang paling tinggi digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan daerah Hal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah daerah masih belum mampu memaksimalkan PAD untuk membiayai kegiatan daerah dan masih bergantung kepada dana yang diberikan oleh pusat. Hal tersebut yang menyatakan bahwa Peningkatan jumlah PAD tidak seimbang dengan peningkatan belanja pemda yang hanya mampu berkontribusi sebesar 20% dari dana PAD.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Anwar, Palar dan Sumual (2016) menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan PAD dari hasil daerah dan peningkatan pemberian DAU dari pemerintah pusat akan selalu mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Santosa (2013) yang juga menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di TTS dengan menambahkan variabel Belanja Modal sebagai variabel intervening. Alasan peneliti menambahkan variabel Belanja Modal sebagai variabel intervening yaitu karena PAD dan DAU tidak secara langsung mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi tetapi harus dialokasikan terlebih dahulu dalam Belanja Modal yang mencakup pembangunan ekonomi daerah dan kemudian Belanja Modal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sesuai dengan tujuan dibentuknya otonomi daerah. Hal tersebut didukung penelitian dari Novianto dan Hanafiah (thn 2015) yang menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, serta variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Prantini thn 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PAD Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **:Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PAD Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penilitan ini memiliki persoalan penilitan sebagai berikut:

1. .Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah(PAD)?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapata asli daerah(PAD)?
3. Apakah belanja modal mempunyai hubungan positif antara dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel intervening Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018-2020?
2. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap variabel intervening Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018-2020?
3. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap variabel intervening KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018-2020?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya bagaimana mengalokasikan dana transfer untuk belanja modal daerah dan belanja pegawai di daerah secara seimbang atau merata.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa/I yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Untuk menambah dan memperkaya wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.